

**DAMPAK KEBIJAKAN PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DI KEPULAUAN
NAIN KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**RISMA SEPTARI AMIRI
SALMIN DENGO
VERY Y. LONDA**

Abstract: This research aims to explain the impact of government policy in improving living standard of people in the Nain Islands of North Minahasa Regency, in order to improve the welfare of the people. This research uses descriptive method of qualitative approach, and data collection technique done by observation, interview technique and documentation. Number of informants is 12 (twelve) persons. This research focuses on government policy in the field of entrepreneurship. The analytical techniques used are qualitative analysis models of interactive models from Miles and Huberman. The results showed that the Impact of Government Policy In Improving the Living Standard of People in the Nain Islands North Minahasa Regency especially in the field of entrepreneur has not give a significant impact on the community in Nain Island. This is mainly, because the aid programs that are given still pay attention to the relationship of friendship and the non-functioning of inter-governmental coordination with the community, the government also does not play an active role in overseeing the implementation of the community program and the lack of public interest in contributing in the field of entrepreneurship by the limitations in skills

Keyword : Impact of the Policy, Living Standard, The Peoples

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 18 UUD Tahun 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur pembagian wilayah Negara kesatuan RI menjadi daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/ kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang ketentuan tersebut merupakan amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 agustus 2002. Sebelum amandemen ketentuan pasal 18 UUD 1945 yakni berbunyi; “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pembangunan Pedesaan yang telah dilaksanakan selama ini, telah banyak mencapai kemajuan dan berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat/martabat masyarakat pedesaan, namun meskipun telah dapat dicapai banyak kemajuan harus diakui masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan yang masih perlu

perhatian dan penanganan maksimal guna kelanjutan pembangunan masyarakat pedesaan.

Dalam pidato presiden tanggal 14 Agustus 2015 di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka peringatan Hut Proklamasi kemerdekaan RI ke-70 menyampaikan bahwa, “Demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Dengan cara itu juga, kita akan memanfaatkan sumberdaya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Oleh karena itu dalam menyongsong pembangunan jangka menengah ini pemerintah masih menempatkan pembangunan pedesaan pada satu prioritas utama yang memperoleh perhatian besar di dalam Pembangunan Nasional. Karena tanpa adanya perhatian pemerintah dalam meningkatkan taraf hidupnya, maka tidak akan bisa menghapus atau mengurangi beban masyarakat dari garis kemiskinan tersebut.

Salah satu peranan pemerintah yang paling penting adalah tergantung dari kebijakannya, yakni kebijakan yang di perlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari keterbelakangan teknologi, dan juga

dengan usaha meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan wirausaha, dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu kebijakan dibidang pendidikan, wirausaha, dan kebijakan di bidang lapangan kerja, antara lainnya:

1. Kebijakan di bidang Pendidikan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1; "Tiap-Tiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan". Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 juni 2003.

2. Kebijakan Di Bidang Wirausaha

Dalam bidang usaha masyarakat menggunakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang usaha rakyat atau KUR sebagaimana yang tertuang dalam peraturan menteri : Nomor 135/PMK/05/2015 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Klaster tiga). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil menengah koperasi (UMKMK) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas pinjaman untuk produktif. KUR adalah program yang dicanangkan pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

3. Kebijakan dibidang lapangan kerja

Pengangguran merupakan masalah nasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga dalam penanggulangannya harus dilakukan oleh semua stakeholders atau terkait secara bersama dan terintegrasi antar lintas sector dan masyarakat, dengan cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, kebijakan pemerintah dalam pembangunan ketenaga kerjaan secara pokok tertuang dalam Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, sebagai pelaksana an pasal 27 ayat 2 (dua). Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Ada dua bagian yang membedakan taraf hidup dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat yaitu dalam bentuk primer dan bentuk sekunder. Taraf hidup primer adalah salah satu kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan. Sedangkan taraf hidup sekunder adalah kebutuhan yang di perlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti alat-alat dan prabot (Manullang, 2011).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Nain, pemerintah memberikan program bantuan untuk Yang sementara ini telah sampai dan dirasakan oleh masyarakat Nain saat ini yaitu, Program bantuan Pendidikan, Kesehatan, dan KIS (kartu Indonesia Sehat), KKS (Kartu keluarga Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (kartu Indonesia pintar) dan KUR (kredit Usaha Rakyat) Dengan adanya pemberian bantuan untuk masyarakat pulau Nain masyarakat pulau Nain, merasa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir seperti di Pulau Nain. Namun sampai saat ini bantuan dari pemerintah daerah belum sampai ke pulau Nain, tetapi program yang sampai saat ini di Pulau Nain yaitu bantuan Program-program dari Pemerintah Pusat.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang sudah disebutkan diatas secara langsung akan dapat meningkatkan taraf hidup dan lebih mempercepat adanya perkembangan desa. Oleh sebab itu kebijakan yang telah diuraikan diatas dapat dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebab semakin baik pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka akan semakin/dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara.

Dari beberapa kebijakan yang telah diuraikan diatas penulis mengambil satu fokus masalah dari penelitian ini adalah Kebijakan di bidang Wirausaha; berdasarkan letak dari kepulauan nain yang berada di pesisir pantai maka masyarakat Pulau Nain kebanyakan berprofesi sebagai Nelayan. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sendiri merasa bahwa dengan menjadi nelayan saja dirasa belum cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan berbagai kebutuhan yang ada, pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun belum semuanya merata, hal ini dikarenakan pembagian yang tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat pulau Nain sendiri, perlu adanya penambahan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan wirausaha masyarakat serta perlu adanya perluasan lahan untuk membudidayakan rumput laut. Penulis mengambil fokus penelitian dibidang wirausaha dengan melihat beberapa kegiatan wirausaha yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pulau nain itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai Dampak Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu "Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Pulau Nain Kabupaten Minahasa Utara".

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan Publik

Berbicara mengenai kebijakan Publik, Menurut Chandler dan Plano (1988) menjelaskan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah dalam kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan

public guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu, angka yang perlu diperhatikan memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan public perlu di perhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau system politik yang disebabkan oleh aksi politik.

4. Konsep Taraf Hidup

Kata taraf hidup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) berarti mutu atau kualitas. Jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat. Strategi pembangunan di Negara berkembang masih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. (Growth oriented strategy). Esmara (2004). Strategi tersebut terpusat pada investasi modal luar negeri yang cukup besar dalam sector seperti industri, pertambangan, dan pemerintah mengarahkan modalnya pada sector pertanian (Evers,1999). Bantuan luar negeri memang berhasil meningkatkan ekonomi Negara yang sedang berkembang, tetapi jumlah penduduk miskin semakin banyak.

5. Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Kebijakan ekonomi suatu Negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas

segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan Negara itu sendiri.

Penelitian Terdahulu

Sujarno 2008. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di kabupaten Langkat” (Studi Kasus di Kabupaten Langkat Sumatera Utara Medan)

Sumberdaya perikanan sebenarnya secara potensial dapat di manfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat.

III. METODE PENELITIAN

Dalam jenis penelitian ini, yang didasari dari sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang masalah penulis, serta disesuaikan dengan tujuan peneliti, maka penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kuantitatif. Model penelitian ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Moleong (2008) metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi dimana peneliti mengumpulkan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. Di sebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan buku profil Pulau Nain menjelaskan bahwa kata nain berasal dari bahasa ‘Bajo’ Penyebutannya adalah Naen, jadi sering terjadi kerancuan dalam penyebutannya, ada yang menyebut ‘Nain’

dan ada yang menyebutnya dengan ‘Naen’. Tidak terdapat perbedaan makna di antaranya. Pulau Nain berada pada wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Utara. Pada perairan Nain terdapat 2 pulau yaitu, Pulau Nain Besar dan Pulau Nain kecil, serta beberapa pulau karang. Pulau Nain kecil tidak berpenghuni. Bangunan yang terdapat di pulau nain hanyalah berupa pondok tempat nelayan singgah untuk istirahat atau disebut dengan “Dasseng”. Namun daerah perkampungan (pemukiman) penduduknya tersebar di sepanjang daerah Pulau Nain. Terdapat 3 perkampungan utama yaitu kampung Nain (Bajo-Siau), kampung tampi dan kampung Tarente. Berbeda dengan pulau nain kecil, Pulau Nain Besar adalah pulau yang berpenghuni. Pulau Nain Besar memiliki keunikan tersendiri jika di bandingkan dengan pulau-pulau disekitarnya antara lain (Mantehage, Bunaken, dan siladen).

1. Upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara

Berdasarkan informan yang telah diwawancara menyatakan bahwa pemerintah sudah mengupayakan berbagai program bantuan untuk masyarakat dan sudah mendistribusikannya terlebih khusus dibidang wirausaha dan masyarakat telah merespon baik atas program bantuan dari pemerintah, akan tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya berpengaruh pada taraf hidup masyarakat pulau nain.

2. Pengaruh adanya kebijakan pemerintah dalam bidang wirausaha kepada masyarakat Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara

Berdasarkan informan yang telah diwawancara menyatakan bahwa Pengaruh dari adanya kebijakan pemerintah dalam bidang wirausaha ini tentu saja dapat membantu banyak bagi masyarakat, tentunya dibidang perekonomian pulau nain, dengan adanya program bantuan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) masyarakat bisa membuka usaha dengan pinjaman modal dari KUR tersebut dengan begitu masyarakat bisa membuka usaha sendiri dengan bantuan dari pemerintah.

3. Ketersediaan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara dalam program bantuan dibidang wirausaha

Berdasarkan informan yang telah diwawancara menyatakan bahwa Untuk ketersediaan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup memadai dengan kebutuhan masyarakat yang inginkan, hanya ada beberapa sarana prasarana yang harus diganti seperti perahu nelayan yang diberikan pemerintah harus di ganti dengan baru mengingat perahu yang di berikan pemerintah waktu lalu sudah tidak layak untuk di gunakan (tua) untuk sebagian masyarakat yang bermata pencaharian nelayan dipulau ini.

4. Kendala atau masalah yang terdapat dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah dibidang wirausaha serta cara mengatasinya.

Berdasarkan informan yang telah diwawancara menyatakan bahwa Terdapat beberapa kendala seperti perlu adanya beberapa sarana prasarana yang baru dibutuhkan masyarakat, mengingat sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah waktu lalu sudah tua atau tidak layak pakai lagi, dari pada hanya diperbaiki terus menerus dan mengeluarkan biaya yang banyak sebaiknya pemerintah membelikan yang baru. Kendala lain yang dihadapi tentang harga rumput laut yang berjumlah Rp.3.500/Kilo menjadi minim sehingga membuat masyarakat yang membudidayakan rumput laut menjadi kurang, kendala lainnya kurangnya minat masyarakat untuk gabung dalam program pemerintah ini, serta kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam mengelolah usaha yang diberikan baik dilihat dari segi SDM pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Adapun cara pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, harga rumput laut yang tadinya berjumlah Rp.3.500/kilo harus di naikkan menjadi Rp.5.000/kilo. Agar masyarakat yang membudidayakan rumput laut tidak berkurang dan tetap bisa membudidayakan rumput laut sehingga bisa menaikkan taraf hidup masyarakat nain beserta pulau nain tersebut.

5. Peran serta koordinasi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pulau nain

Berdasarkan informan yang telah diwawancara menyatakan bahwa Peran pemerintah belum cukup baik yang dirasakan oleh masyarakat, dilihat bagaimana pemerintah belum berperan penuh untuk mengawasi usaha yang dikelola oleh masyarakat pulau nain. begitu juga dengan koordinasi pemerintah dengan masyarakat dalam mengelolah usaha masyarakat. Koordinasi pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah di bidang wirausaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kepulauan Nain antara lain seperti membentuk suatu kelompok usaha bersama (KUBE), dan mengumpulkan sepuluh orang nelayan yang masing-masingnya akan di berikan satu ketinting dan satu freezer untuk di gunakan saat mencari ikan di laut dan menyimpan hasil tangkapan ikan tersebut, dengan adanya program bantuan pemerintah dalam bidang wirausaha kami pemerintah juga selalu mengawasi usaha yang di jalankan masyarakat, apa saja yang dilakukan masyarakat dalam usaha mereka.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kebijakan peningkatan taraf hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kepulauan nain Kabupaten Minahasa Utara untuk masyarakat Kepulauan Nain belum memberikan dampak yang berarti pada masyarakat Pulau Nain, Hal ini lebih disebabkan karena program bantuan yang diberikan masih memperhatikan hubungan keakraban dan tidak berfungsinya koordinasi antar pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah juga tidak berperan aktif dalam mengawasi jalannya pelaksanaan program masyarakat serta kurangnya minat masyarakat dalam

berkontribusi dibidang usaha oleh keterbatasan dalam ketrampilan.

2. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di kepulauan nain kabupaten minahasa utara yaitu diantaranya; Pemberian bantuan harus diberikan harus obyektif pada kelompok sasaran, perlunya koordinasi pemerintah pulau Nain Kabupaten Minahasa Utara dengan pemerintah daerah dikepulauan nain dalam memastikan masyarakat yang tepat untuk mendapatkan program bantuan dibidang wirausaha, perlunya peran aktif pemerintah dalam mengawasi jalannya usaha dari masyarakat yang mendapatkan bantuan, serta perlunya meningkatkan ketrampilan dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat penerima program bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. 1984. *Pembuatan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chandler, Ralph C, Plano, dan Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Dye, T.R. 1981. *Memahami Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Evers, H.D. 1998. *Teori Masyarakat : Proses peradaban dalam sistem dunia modern*, Jakarta : Yayasan obor Indonesia.
- Esmara, H. 2004. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok Miskin*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosada Karya.
- Manullang, M. 2011. *Prilaku organisasi*. Jakarta: Penerbit Usaha Nasional Jakarta.
- Sujarno. 2008. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di kabupaten Langkat" (Studi Kasus di Kabupaten Langkat Sumatera Utara Medan).
- Singarimbun, Masri dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Bandung; Alfabeta.
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.